

## Analisis ekonomi inklusif di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menggunakan data panel

Ahmad Fahri Umardani\*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

\*) Korespondensi (e-mail: [dani.fahri18@gmail.com](mailto:dani.fahri18@gmail.com))

### Abstract

The purpose of this study is to analyze the effects of the Human Development Index (HDI), Domestic Investment, Open Unemployment Rate, electricity access, and internet access on the Inclusive Economic Development Index (IEDI) in West Kalimantan and East Kalimantan Provinces. The study employs panel data at the district/city level covering the period 2018–2022, sourced from Statistics Indonesia and the National Development Planning Agency (BAPPENAS). Panel data regression is applied as the analytical method. The results indicate that in West Kalimantan, HDI, electricity access, and internet access have positive and significant effects on inclusive economic development. Meanwhile, in East Kalimantan, HDI shows a positive and significant effect, whereas the open unemployment rate significantly affects inclusive economic development. These findings suggest that the determinants of inclusive economic development vary across regions. Therefore, development policies should be region-specific, focusing on improving human capital quality, expanding access to basic infrastructure, and addressing labor market issues in order to promote more inclusive and sustainable economic growth.

Keywords: Inclusive Economic Development Index, Human Development Index, Electricity Access, Internet Access.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Penanaman Modal Dalam Negeri, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), akses listrik, dan akses internet terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Data yang digunakan merupakan data panel kabupaten/kota selama periode 2018–2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat, IPM, akses listrik, dan akses internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPEI. Sementara itu, di Provinsi Kalimantan Timur, IPM berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka berpengaruh signifikan terhadap IPEI. Temuan ini mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi inklusif bersifat spesifik wilayah. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pembangunan perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah, khususnya melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur dasar, serta penanganan permasalahan ketenagakerjaan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusi, Indeks Pembangunan Manusia, Akses Listrik, Akses Internet.

---

How to cite: Umardani, A. F. (2026). Analisis ekonomi inklusif di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menggunakan data panel. *Journal of Economics Research and Policy Studies*, 6(1), 47–64. <https://doi.org/10.53088/jerps.v6i1.2737>

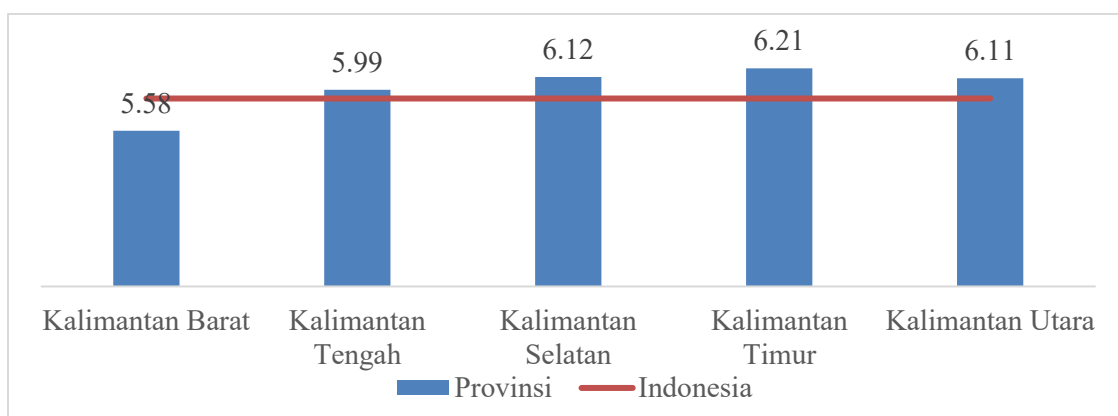
---



## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi di Indonesia tidak lagi hanya diukur dari besarnya pertumbuhan produk domestik bruto, tetapi juga dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu menciptakan kesejahteraan yang merata. Oleh karena itu, konsep pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi semakin relevan dalam diskursus akademik maupun kebijakan publik, karena menekankan pentingnya keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan pemerataan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. World Bank mendefinisikan pertumbuhan inklusif sebagai pertumbuhan yang mampu menciptakan kesetaraan kesempatan melalui penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar, serta peningkatan akses terhadap aktivitas ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga taraf hidup dapat meningkat secara berkelanjutan (Klasen, 2017). Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi inklusif juga mendorong setiap individu untuk memperoleh akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, serta komponen lain yang menunjang peningkatan kualitas hidup (Kristyanto & Kaluge, 2018).

Dilihat dari perspektif wilayah, perkembangan ekonomi Indonesia memperlihatkan dinamika yang berbeda-beda antar daerah. Pulau Kalimantan merupakan salah satu kawasan yang memiliki prospek ekonomi yang kuat, ditunjang oleh ketersediaan sumber daya alam seperti minyak, gas alam, dan batu bara yang selama ini menjadi motor utama aktivitas industri serta investasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kalimantan merupakan salah satu wilayah dengan kontribusi ekonomi terbesar setelah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kalimantan memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional di luar Pulau Jawa. Namun demikian, tingkat inklusivitas ekonomi di masing-masing provinsi di Kalimantan masih menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Perbedaan karakteristik struktural, tingkat pembangunan manusia, serta pemerataan infrastruktur ekonomi dapat memengaruhi sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat inklusif. Untuk melihat kondisi tersebut, berikut disajikan nilai rata-rata Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di setiap provinsi di Kalimantan selama periode 2018–2022 sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan Rata-rata Nilai IPEI Provinsi di Kalimantan dengan Rata-rata Nasional Tahun 2018-2022

Berdasarkan Gambar 1, diketahui perbandingan nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) antar provinsi di Kalimantan dibandingkan dengan rata-rata nasional. Nilai IPEI provinsi-provinsi di Kalimantan menunjukkan variasi, secara umum sebagian besar provinsi di Kalimantan memiliki nilai IPEI mendekati atau sedikit di atas rata-rata nasional. Di antara semua provinsi, Kalimantan Timur memiliki nilai IPEI tertinggi, yang mencerminkan kinerja pembangunan ekonomi yang relatif lebih inklusif dibandingkan provinsi lainnya di wilayah Kalimantan. Sebaliknya, Kalimantan Barat mencatat nilai terendah serta menjadi satu-satunya provinsi di Kalimantan yang berada dibawah rata-rata nasional, kondisi ini mengindikasikan bahwa inklusivitas pembangunan ekonominya masih tertinggal dibandingkan provinsi Kalimantan lainnya maupun capaian Indonesia secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Kalimantan Timur lebih inklusif dibandingkan provinsi lainnya, sementara Kalimantan Barat masih memerlukan penguatan dalam pemerataan manfaat pembangunan. Secara keseluruhan, terdapat ketimpangan inklusivitas pembangunan ekonomi antarprovinsi di Kalimantan. Perbedaan yang cukup mencolok ini menunjukkan adanya dinamika pembangunan yang tidak seragam antarprovinsi di Kalimantan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memahami faktor-faktor yang mendorong kesenjangan tersebut.

Perbedaan capaian nilai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) tidak hanya mencerminkan output ekonomi, tetapi turut dipengaruhi oleh faktor sosial, investasi, pasar tenaga kerja dan ketersediaan infrastruktur dasar. Indikator pembangunan manusia seperti IPM berkaitan dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi. IPM mencerminkan adanya perbaikan kinerja pembangunan manusia yang meliputi dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Menurut Fitrianasari (2021), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Hasil yang serupa juga ditunjukkan oleh penelitian Ilyas dan Prasetya (2023), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI). Penelitian lain yang mengkaji IPM terhadap pertumbuhan inklusif juga dilakukan oleh Oyinlola et al., (2021) memperlihatkan hasil yang sama bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif.

Pertumbuhan ekonomi inklusif dalam jangka panjang tidak lepas dari investasi, salah satunya yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). PMDN merupakan investasi yang dilakukan oleh individu tau badan usaha lokal yang bertujuan untuk membangun atau memperluas usaha yang berpotensi meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan mendorong inovasi. Teori pertumbuhan endogen Romer (1990) menjelaskan bahwa investasi domestik berkontribusi terhadap akumulasi modal fisik dan peningkatan produktivitas melalui efek melimpahnya teknologi dan inovasi, yang meningkatkan efisiensi ekonomi. Pada penelitian Rahmawati et al. (2021) menunjukkan bahwa Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi inklusif di

kota/kabupaten Jawa Timur tahun 2015-2019. Penelitian lain yang dilakukan Afdal (2018) mengenai pengaruh PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan di 33 Provinsi di Indonesia menunjukkan hasil bahwa PMDN berpengaruh positif dan signifikan.

Faktor lain yang mampu mempengaruhi pembangunan inklusif yaitu tingkat pengangguran terbuka. Bergeraknya roda perekonomian salahsatunya disebabkan oleh modal manusia yang berupa tenaga kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan kemampuan perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan Zhulaikah (2024) menemukan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di kawasan Indonesia Timur. Penelitian lain yang dilakukan Oktavia (2024) menunjukkan hal yang serupa, bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Pulau Sumatera.

Dalam pembangunan ekonomi, sektor tenaga listrik memiliki peran strategis terutama dalam pemerataan dan pemenuhan konsumsi energi listrik. akses listrik merupakan aspek yang sangat penting dan perlu diperhatikan, karena tidak hanya menjadi indikator ketersediaan infrastruktur dasar, tetapi juga berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Pada penelitian Afriyana et al. (2023) akses listrik memiliki hubungan jangka panjang yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi inklusif di Nusa Tenggara Barat. Penelitian lain yang dilakukan oleh Xu et al. (2024) menunjukkan bahwa peningkatan energi listrik secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, ketersediaan energi listrik merupakan faktor produktivitas utama bagi masyarakat.

Selain akses listrik, pemerataan infrastruktur digital juga menjadi aspek penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat seperti akses internet. Akses internet yang lebih merata biasanya mendorong peningkatan aktivitas produktif, kemudahan informasi, dan efisiensi usaha, sehingga dapat berdampak pada kinerja ekonomi daerah. Pada penelitian Prawesti (2023) menemukan bahwa akses internet memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif di Jawa Timur. Selain itu, berdasarkan temuan Pratiwi (2024) menegaskan bahwa peningkatan akses internet berdampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif.

Penelitian ini menjadi penting mengingat adanya perbedaan capaian pembangunan ekonomi inklusif di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, serta masih terbatasnya kajian empiris yang secara simultan menguji peran IPM, PMDN, TPT, akses listrik, dan akses internet terhadap IPEI. Disparitas tersebut menunjukkan bahwa determinan pembangunan ekonomi inklusif kemungkinan bersifat spesifik wilayah dan memerlukan analisis yang lebih terfokus, khususnya dalam merumuskan strategi peningkatan IPEI di Kalimantan Barat agar mampu mengejar capaian yang lebih tinggi seperti di Kalimantan Timur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IPM, PMDN, TPT, akses listrik, dan akses internet terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di

Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur selama periode 2018–2022. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai determinan pembangunan ekonomi inklusif dengan mengintegrasikan indikator modal manusia, investasi domestik, pasar tenaga kerja, serta infrastruktur dasar dan digital dalam satu kerangka analisis.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya peran modal manusia, investasi, serta infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam kerangka tersebut, pembangunan ekonomi inklusif dipandang sebagai hasil interaksi antara kualitas sumber daya manusia, dinamika pasar tenaga kerja, investasi domestik, serta ketersediaan infrastruktur dasar dan digital. Penelitian ini menekankan apakah faktor-faktor tersebut selalu bekerja secara seragam antarwilayah, sehingga diperlukan analisis komparatif untuk memahami karakteristik determinan pembangunan ekonomi inklusif pada masing-masing daerah.

## 2. Tinjauan Pustaka

### Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori pertumbuhan endogen diperkenalkan oleh Romer (1986), sebagai upaya untuk melengkapi model pertumbuhan neoklasik yang memandang kemajuan teknologi sebagai faktor eksogen. Teori pertumbuhan endogen menempatkan teknologi dan modal manusia sebagai determinan utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori tersebut menjelaskan bahwa kemajuan teknologi dihasilkan melalui akumulasi pengetahuan, investasi, pendidikan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D), yang menciptakan efek limpahan pengetahuan dan meningkatkan produktivitas secara menyeluruh. Dalam perspektif ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh akumulasi modal fisik, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia dan lingkungan yang mendukung inovasi.

Dalam pembangunan ekonomi inklusif, faktor-faktor endogen tersebut berperan dalam memperluas akses dan kesempatan ekonomi. Investasi pada modal manusia dan infrastruktur produktif tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga berpotensi memperluas distribusi manfaat pertumbuhan kepada berbagai kelompok masyarakat. Dengan demikian, pendekatan pertumbuhan endogen memberikan kerangka analitis untuk memahami bagaimana pertumbuhan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan inklusif.

Dalam kerangka tersebut, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan penguatan modal manusia yang berperan penting dalam memperluas kapasitas kerja dan kesempatan ekonomi masyarakat, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan (UNDP, 2024). Investasi domestik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berfungsi meningkatkan kapasitas produksi serta mendorong penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Romer, 1986). Sebaliknya, tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang tinggi dapat melemahkan proses akumulasi modal manusia dan pembelajaran produktif karena tenaga kerja tidak terserap secara optimal, sehingga

menurunkan output dan memperlambat peningkatan kesejahteraan masyarakat (Romer, 1989). Selain itu, teori pertumbuhan endogen menekankan pentingnya lingkungan yang mendukung inovasi dan difusi pengetahuan, di mana infrastruktur menjadi prasyarat utama dalam menurunkan biaya transaksi dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Secara operasional, ketersediaan akses listrik menunjang aktivitas produksi dan penyediaan layanan publik, sementara akses internet memperkuat konektivitas, penyebaran informasi, dan efisiensi pasar, yang pada akhirnya memperluas partisipasi ekonomi dan mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

### **Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Pembangunan ekonomi maupun pertumbuhan suatu negara dapat diketahui sudah tergolong inklusif ataupun tidak inklusif dapat diketahui melalui besaran indeks. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia, baik pada level nasional, provinsi serta kabupaten/kota. Menurut Bappenas (2019) inklusivitas pembangunan di Indonesia dapat diukur melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif, berikut 3 pilar tersebut: (1) Pilar I, yaitu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang terdiri dari 3 pilar, antara lain yaitu pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan infrastruktur ekonomi yang masing-masing terdiri dari tiga indikator. (2) Pilar II, yaitu pemerataan pendapatan serta pengurangan kemiskinan yang tergolong dari 2 sub pilar, ketimpangan terdiri dari tiga indikator dan kemiskinan terdiri dari dua indikator. (3) Pilar III, yaitu perluasan akses dan kesempatan yang terdiri dari 3 sub pilar, antara lain kapabilitas manusia yang terdiri dari tiga indikator, infrastruktur dasar yang terdiri dari dua indikator.

### **Indeks Pembangunan Manusia**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mencerminkan kualitas pembangunan manusia melalui dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak (BPS, 2024). Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan kualitas sumber daya manusia yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan partisipasi ekonomi masyarakat (UNDP, 2024). Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) digunakan untuk menilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan kesejahteraan yang merata, menurunkan kemiskinan dan ketimpangan, serta memperluas akses dan kesempatan ekonomi. Dalam kerangka pembangunan inklusif, peningkatan IPM berperan penting dalam mendorong peningkatan IPEI karena kualitas manusia yang lebih baik memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara lebih luas dan merata dalam aktivitas ekonomi. Temuan empiris di Indonesia menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan ekonomi inklusif lintas daerah, sehingga IPM sering dijadikan variabel kunci dalam analisis IPEI (Marina & Satrianto, 2023).

### **Penanaman Modal Dalam Negeri**

Menurut BPS (2024) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dari dalam negeri dengan menggunakan modal dari dalam negeri. Peningkatan PMDN diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperluas aktivitas ekonomi, sehingga berkontribusi pada perbaikan kesejahteraan secara lebih merata (Todaro & Smith, 2020). Dalam kerangka pembangunan ekonomi inklusif, investasi domestik dinilai tidak hanya dari besarnya nilai investasi, tetapi juga dari kemampuannya dalam memperluas kesempatan kerja dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) digunakan untuk mengukur kualitas pertumbuhan ekonomi yang mencakup aspek pertumbuhan, pemerataan, dan akses terhadap peluang ekonomi, sehingga PMDN dipandang sebagai salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi capaian IPEI lintas daerah.

### **Tingkat Pengangguran Terbuka**

Menurut BPS (2024) pengangguran merupakan penduduk yang sedang mencari kerja maupun yang mempersiapkan usaha atau penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, atau sudah mempunyai pekerjaan maupun belum memulai untuk bekerja. Dalam kerangka pertumbuhan inklusif, penciptaan kesempatan kerja menjadi hal yang penting, sehingga menurunnya penyerapan tenaga kerja yang tercermin dari tingginya tingkat pengangguran terbuka berpotensi menghambat tercapainya pembangunan yang inklusif (Ianchovichina & Lundstrom, 2009). Oleh karena itu, TPT yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap IPEI karena pengangguran menghambat peningkatan kesejahteraan dan mempersempit akses masyarakat terhadap peluang ekonomi. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa TPT memiliki hubungan negatif dengan IPEI, yang mengindikasikan bahwa peningkatan TPT cenderung diikuti oleh penurunan capaian IPEI selama periode pengamatan 2015-2021 (Handayani & Karimi, 2024)

### **Akses Listrik**

Kementrian ESDM (2023) listrik adalah sumber energi yang dihasilkan dari berbagai jenis pembangkit yang diolah dari berbagai sumber daya seperti tenaga uap, tenaga surya, tenaga panas bumi dan tenaga air. Akses terhadap listrik dipresentasikan melalui presentase rumah tangga yang menggunakan penerangan bersumber listrik dari PLN. Akses listrik merupakan aspek penting dalam peningkatan kualitas hidup dan penguatan daya saing ekonomi masyarakat. Menurut Rafindadi et al. (2022) listrik merupakan komponen penting dalam proses produksi saat ini, hingga kini, belum ada sumber energi lain yang mampu menggantikan peran listrik dalam mendukung aktivitas produksi untuk memenuhi konsumsi dalam negeri atau ekspor dalam ekonomi apapun. Negara maju pada umumnya, sangat memperhatikan pembangunan sektor tenaga listrik untuk menjaga produktivitas dan daya saing industri serta menjamin kesejahteraan warga negaranya (Sambodo et al., 2016).

### Akses Internet

Akses terhadap internet yang dipresentasikan melalui presentase penduduk berusia lima tahun ke atas yang mengakses internet, di antaranya menggunakan telepon seluler sebagai perangkat utamanya. Perkembangan teknologi dan meluasnya jaringan membantu meningkatkan penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudahan akses ini semakin didukung oleh semakin terjangkaunya harga *smartphone*, sehingga jumlah penggunaannya semakin meningkat. Internet telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi, hiburan hingga kegiatan ekonomi digital. Dalam konteks ini, akses internet bukan hanya sarana komunikasi, melainkan instrumen ekonomi digital yang memperluas akses pasar, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan produktivitas usaha (Gati & Khoirunurrofik, 2023). Dampak ini secara empiris tercermin pada penurunan ketimpangan pendapatan dan penurunan tingkat pengangguran, yang keduanya merupakan komponen penting dalam pembentukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

### 3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data panel. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memanfaatkan teori-teori dan temuan penelitian sebelumnya untuk melihat kondisi empiris secara lebih nyata pada wilayah penelitian. Melalui metode ini, penelitian berupaya membuktikan dugaan adanya hubungan antara variabel bebas (IPM, PMDN, TPT, akses listrik, dan akses internet) terhadap variabel terikat berupa Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.

Tabel 1. Deskripsi Operasional Variabel

| No. | Variabel                            | Definisi Operasional  | Satuan    |
|-----|-------------------------------------|---|-----------|
| 1   | Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif | Indeks yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mencakup pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan pengurangan kemiskinan | Indeks    |
| 2   | Indeks Modal Manusia                | Indeks komposit yang mengukur capaian pembangunan manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak                               | Indeks    |
| 3   | Penanaman Modal Dalam Negeri        | Nilai realisasi investasi yang berasal dari penanaman modal oleh investor domestik dalam suatu wilayah  | Juta (Rp) |
| 4   | Tingkat Pengangguran Terbuka        | Persentase angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan   | Persen    |
| 5   | Akses listrik                       | Presentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap listrik  | Persen    |
| 6   | Akses Internet                      | Persentase penduduk yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir  | Persen    |

Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk data panel yang diperoleh dari berbagai publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan mencakup variabel IPM, PMDN, tingkat pengangguran terbuka (TPT), akses listrik,

dan akses internet untuk wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Seluruh variabel tersebut diambil dalam rentang waktu 2018–2022. Sementara itu, data Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) sebagai variabel terikat diperoleh dari publikasi BAPPENAS untuk periode yang sama. Berikut Tabel 1, yang menunjukkan deskripsi variabel pada penelitian ini:

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Sebelum menentukan model regresi yang tepat, dilakukan serangkaian pengujian pemilihan model yang terdiri dari Uji Chow untuk membandingkan Common Effect Model dengan Fixed Effect Model, serta Uji Hausman untuk menentukan pilihan antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model. Penelitian mengenai Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (IPEI) pada tingkat provinsi di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat masih relatif terbatas, selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menguji variabel-variabel seperti modal manusia, investasi, atau ketenagakerjaan secara terpisah, dan belum banyak yang mengintegrasikannya secara simultan dengan indikator infrastruktur dasar dan digital. Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan spesifikasi model dengan menggabungkan variabel IPM, PMDN, TPT, akses listrik, dan akses internet dalam satu persamaan empiris berbasis data panel. Adapun persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPEI_{it} = \alpha + \beta_1 IPM_{it} + \beta_2 LOGPMDN_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 AKSESLIS_{it} + \beta_5 AKSESINT_{it} + e_{it}$$

Dimana:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| IPEI                  | = Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif (indeks, skala 1-10); |
| IPM                   | = Indeks Pembangunan Manusia (indeks, skala 1-100);         |
| LOGPMDN               | = Penanaman Modal Dalam Negeri (persentase,%);              |
| TPT                   | = Tingkat Pengangguran Terbuka (persentase,%);              |
| AKSESLIS              | = Akses Listrik (persentase,%);                             |
| AKSESINT              | = Akses Internet (persentase,%);                            |
| $\alpha$              | = Konstanta;  |
| $\beta_1$ - $\beta_5$ | = Koefisien regresi   |
| i                     | = Data <i>cross-section</i> ;                               |
| t                     | = Data <i>time series</i> ;                                 |
| e                     | = Gangguan residual.  |

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Hasil penelitian

#### Pemilihan Model Regresi Data Panel

Tabel 2. Hasil Uji Chow

| Effects Test             | Kalimantan Barat |        | Kalimantan Timur |        |
|--------------------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                          | Statistic        | Prob.  | Statistic        | Prob.  |
| Cross-section F          | 30,629059        | 0,0000 | 23,0641          | 0,0000 |
| Cross-section Chi-square | 152,291517       | 0,0000 | 96,798536        | 0,0000 |

Tabel 2 hasil Uji Chow yang dilakukan pada Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur diperoleh nilai probabilitas  $0,0000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan

bahwa model yang tepat untuk digunakan adalah *Fixed Effect Model* dibandingkan dengan *Common Effect Model*.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

| Effects Test    | Kalimantan Barat |        | Kalimantan Timur |        |
|-----------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                 | Statistic        | Prob.  | Statistic        | Prob.  |
| Cross-section F | 9,903037         | 0,0780 | 3,535559         | 0,6180 |

Tabel 3 hasil Uji Hausman pada Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan nilai probabilitas sebesar  $0,0780 > 0,05$  dan untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar  $0,6180 > 0,05$ . Dengan demikian, karena nilai probabilitas kedua provinsi lebih besar dari  $0,05$ , sehingga dapat menunjukkan bahwa *Random Effect Model* lebih baik dibandingkan dengan *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

| Effects Test     | Kalimantan Barat |        | Kalimantan Timur |        |
|------------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                  | Statistic        | Prob.  | Statistic        | Prob.  |
| Breusch-Pagan LM | 74,33157         | 0,0000 | 57,66744         | 0,0000 |

Tabel 4 hasil Uji Breusch-Pagan LM yang dilakukan, kedua provinsi memiliki nilai probabilitas yang sama yaitu sebesar  $0,0000 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa *Random Effect Model* lebih baik digunakan dibandingkan dengan model *Pooled OLS*. Dengan demikian, setelah dilakukan serangkaian pengujian data panel yang meliputi *Uji Chow*, *Uji Hausman* dan *Uji Lagrange Multiplier*, diketahui bahwa model yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect Model*.

### Uji Asumsi Klasik

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas (Kalimantan Barat)

|          | IPM       | LOGPMDN   | TPT       | AKSESLIS  | AKSESINT  |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| IPM      | 1,000000  | -0,328011 | 0,783735  | 0,499339  | 0,687403  |
| LOGPMDN  | -0,328011 | 1,000000  | -0,252979 | -0,151118 | -0,209805 |
| TPT      | 0,783735  | -0,252979 | 1,000000  | 0,621202  | 0,685673  |
| AKSESLIS | 0,499339  | -0,151118 | 0,621202  | 1,000000  | 0,658705  |
| AKSESINT | 0,687403  | -0,209805 | 0,685673  | 0,658705  | 1,000000  |

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas (Kalimantan Timur)

|          | IPM      | LOGPMDN  | TPT      | AKSESLIS | AKSESINT |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| IPM      | 1,000000 | 0,181089 | 0,824079 | 0,580202 | 0,720769 |
| LOGPMDN  | 0,181089 | 1,000000 | 0,003971 | 0,302611 | 0,249398 |
| TPT      | 0,824079 | 0,003971 | 1,000000 | 0,332131 | 0,505236 |
| AKSESLIS | 0,580202 | 0,302611 | 0,332131 | 1,000000 | 0,652289 |
| AKSESINT | 0,720769 | 0,249398 | 0,505236 | 0,652289 | 1,000000 |

Tabel 5 dan Tabel 6 seluruh variabel independen menunjukkan nilai koefisien korelasi  $< 0,8$ . Hal ini menunjukkan bahwa antar variabel independen tidak memiliki hubungan yang kuat, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak mengalami gejala multikolinieritas.

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

| Effects Test          | Kalimantan Barat |        | Kalimantan Timur |        |
|-----------------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                       | Obs*R-squared    | Prob.  | Obs*R-squared    | Prob.  |
| Breusch-Pagan-Godfrey | 2,652063         | 0,7534 | 6,748406         | 0,2400 |

Tabel 7 hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan pada kedua provinsi, setiap variabel independen memiliki nilai probabilitas > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heterokedastisitas.

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas

| Effects Test   | Kalimantan Barat |             | Kalimantan Timur |             |
|----------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
|                | Jarque-Bera      | Probability | Jarque-Bera      | Probability |
| Normality Test | 3,391394         | 0,183471    | 2,583457         | 0,274795    |

Tabel 8 hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera pada Provinsi Kalimantan Barat sebesar 0,183471 dan pada Provinsi Kalimantan Timur 0,274795. Kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

### Hasil Regresi Analisis Data

Tabel 9. Hasil Regresi Data Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur

| Variabel          | Kalimantan Barat |        | Kalimantan Timur |        |
|-------------------|------------------|--------|------------------|--------|
|                   | Coefficient      | Prob.  | Coefficient      | Prob.  |
| C                 | 0,752550         | 0,3579 | -2,858596        | 0,0097 |
| IPM               | 0,048645         | 0,0003 | 0,115615         | 0,0000 |
| LOGPMDN           | 0,003454         | 0,6333 | 0,000914         | 0,9206 |
| TPT               | -0,006643        | 0,4556 | -0,035468        | 0,0026 |
| AKSESLIS          | 0,011293         | 0,0000 | -0,002278        | 0,1553 |
| AKSESINT          | 0,004569         | 0,0000 | 0,001887         | 0,1347 |
| R-squared         | 0,816485         |        | 0,790721         |        |
| F-statistic       | 56,94899         |        | 33,24918         |        |
| Prob(F-statistic) | 0,000000         |        | 0,000000         |        |

Berdasarkan Tabel 9, pada Kalimantan Barat nilai adjusted R Square yang mencapai 0,816485, bahwa 81,65% variasi IPEI dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sementara 18,35% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai F-statistic sebesar 56,94899 dengan Prob(F) 0,000000 mengindikasikan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPEI, sehingga model layak digunakan. Sebaliknya pada Kalimantan Timur nilai adjusted R Square yang mencapai 0,790721, bahwa 79,07% variasi IPEI dapat dijelaskan oleh variabel dalam model, sementara 20,93% dipengaruhi oleh faktor lain. Nilai F-statistic sebesar 33,24918 dengan Prob(F) 0,000000 mengindikasikan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap IPEI, sehingga model layak digunakan.

Secara parsial variabel IPM memiliki hasil estimasi yang berdampak positif dan signifikan di kedua provinsi. Pada Provinsi Kalimantan Barat, variabel IPM memiliki koefisien sebesar 0,048645 yang bernilai positif, sehingga ketika IPM mengalami peningkatan sebesar 1 poin indeks maka akan menaikkan IPEI sebesar 0,048645 poin

indeks. Sedangkan pada Provinsi Kalimantan Timur, IPM memiliki koefisien sebesar 0,115615 yang bernilai positif, sehingga ketika IPM mengalami peningkatan sebesar 1 satuan maka akan menaikkan IPEI sebesar 0,115615 poin indeks.

Selanjutnya, variabel LOGPMDN, Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur memiliki hasil yang sama. Dimana pada kedua provinsi, variabel LOGPMDN tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPEI. Pada Provinsi Kalimantan Barat, variabel LOGPMDN memiliki koefisien sebesar 0,003454 yang bernilai positif, sehingga ketika LOGPMDN mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menaikkan IPEI sebesar 0,003454 poin indeks. Sedangkan pada Provinsi Kalimantan Timur, variabel LOGPMDN memiliki koefisien sebesar 0,000914 yang bernilai positif, sehingga ketika LOGPMDN mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menaikkan IPEI sebesar 0,000914 poin indeks.

Berbeda dengan variabel sebelumnya, variabel TPT menunjukkan hasil yang berbeda antara kedua provinsi. Variabel TPT Provinsi Kalimantan Barat tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap IPEI, variabel TPT memiliki koefisien sebesar 0,006643 yang bernilai negatif, sehingga ketika TPT mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menurunkan IPEI sebesar 0,006643 poin indeks. Sebaliknya, pada variabel TPT Provinsi Kalimantan Timur memiliki pengaruh signifikan terhadap IPEI, dengan memiliki koefisien sebesar 0,035468 yang bernilai negatif, sehingga ketika TPT mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menurunkan IPEI sebesar 0,035468 poin indeks.

Selanjutnya, variabel akses internet Provinsi Kalimantan Barat memiliki pengaruh signifikan terhadap IPEI, dengan memiliki koefisien sebesar 0,004569 yang bernilai positif, sehingga ketika akses internet mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menaikkan IPEI sebesar 0,004569 poin indeks. Sebaliknya, variabel akses internet pada Provinsi Kalimantan Timur tidak berpengaruh terhadap IPEI, dengan memiliki koefisien sebesar 0,001887 yang bernilai positif, sehingga ketika akses internet mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menaikkan IPEI sebesar 0,001887 poin indeks.

Selain akses internet, variabel akses listrik Provinsi Kalimantan Barat berpengaruh signifikan terhadap IPEI, dengan memiliki koefisien sebesar 0,011293 yang bernilai positif, sehingga ketika akses listrik mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menaikkan IPEI sebesar 0,011293 poin indeks. Di sisi lain, variabel akses listrik Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki pengaruh terhadap IPEI, dengan memiliki koefisien sebesar 0,002278 yang bernilai negatif, sehingga ketika akses listrik mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka akan menurunkan IPEI sebesar 0,002278 poin indeks.

#### **4.2. Pembahasan**

##### **Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

IPM terbukti berpengaruh signifikan terhadap IPEI baik di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurlina et al., (2021) dan Raheem et al., (2018) yang menyatakan

bahwa Indeks Pembangunan Manusia memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan faktor fundamental dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif di kedua provinsi. Namun, peran IPM di Kalimantan Barat menjadi lebih krusial karena masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan dan kesehatan antarwilayah kabupaten/kota. Oleh karena itu, peningkatan IPM melalui perbaikan akses pendidikan, layanan kesehatan, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi strategi utama bagi Kalimantan Barat untuk meningkatkan IPEI agar mendekati Kalimantan Timur.

### **Penanaman Modal Dalam Negeri dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Herdiyati (2022) dan Anjani & Prasetyo (2024). PMDN tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap IPEI, baik di Kalimantan Barat maupun Kalimantan Timur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aliran investasi domestik yang masuk belum sepenuhnya bersifat inklusif. Investasi cenderung terkonsentrasi pada sektor-sektor padat modal dan wilayah tertentu, sehingga manfaat ekonomi yang dihasilkan belum terdistribusi secara merata kepada masyarakat luas. Di Kalimantan Barat, peningkatan kualitas investasi perlu diarahkan pada sektor padat karya dan berbasis ekonomi lokal agar PMDN dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap peningkatan IPEI.

### **Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

TPT berpengaruh signifikan terhadap IPEI di Kalimantan Timur, temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati et al. (2021), namun TPT tidak berpengaruh signifikan di Kalimantan Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Maknun (2024) juga menunjukkan bahwa TPT tidak berpengaruh terhadap IPEI, hal ini mencerminkan perbedaan struktur pasar tenaga kerja di kedua provinsi. Di Kalimantan Timur, dinamika ketenagakerjaan memiliki peran penting karena sektor industri dan pertambangan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebaliknya, di Kalimantan Barat, pasar tenaga kerja masih didominasi sektor informal dan pertanian tradisional, sehingga variasi TPT belum mampu mencerminkan tingkat inklusivitas ekonomi secara langsung. Dalam jangka menengah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan transformasi ekonomi di Kalimantan Barat diharapkan dapat menjadikan variabel ketenagakerjaan lebih berperan dalam meningkatkan IPEI.

### **Akses Listrik dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Akses listrik berpengaruh signifikan terhadap IPEI di Kalimantan Barat, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Opoku et al., (2025) dan Jayanti et al., (2023), sedangkan di Kalimantan Timur akses listrik tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa listrik masih merupakan faktor pembatas utama pembangunan inklusif di Kalimantan Barat. Keterbatasan akses listrik di wilayah pedesaan dan daerah terpencil menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik. Sebaliknya, di Kalimantan Timur, jumlah persentase rumah tangga yang memiliki akses listrik sudah relatif tinggi menyebabkan variasi akses listrik tidak lagi menjadi faktor pembeda dalam pembentukan IPEI. Oleh karena itu, upaya peningkatan IPEI di Kalimantan Barat perlu difokuskan pada perluasan dan pemerataan akses listrik

sebagai fondasi utama bagi penguatan aktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif.

### **Akses Internet dan Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif**

Akses internet berpengaruh signifikan terhadap IPEI di Kalimantan Barat, Temuan ini sejalan dengan Nchake & Shuaibu (2022) serta Adeleye et al. (2023), sedangkan di Kalimantan Timur akses internet tidak berpengaruh signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa konektivitas digital memainkan peran penting dalam mendorong inklusivitas ekonomi di Kalimantan Barat, terutama dalam membuka akses informasi, pasar, dan layanan publik digital. Keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah berpotensi memperbesar kesenjangan ekonomi dan sosial antarwilayah, sehingga memengaruhi tingkat inklusivitas pembangunan. Di Kalimantan Timur, infrastruktur digital yang relatif lebih maju dan merata menyebabkan akses internet tidak lagi menjadi faktor pembeda utama dalam pembentukan IPEI. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh akses internet terhadap pembangunan ekonomi inklusif bersifat kontekstual dan dipengaruhi oleh tingkat kematangan infrastruktur wilayah. Dengan demikian, peningkatan kualitas dan pemerataan akses internet di Kalimantan Barat berpotensi menjadi faktor pendukung penting dalam mendorong peningkatan IPEI melalui penguatan aktivitas ekonomi dan partisipasi masyarakat secara lebih inklusif.

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, analisis dalam penelitian ini cenderung lebih menekankan pada kondisi Kalimantan Barat dibandingkan Kalimantan Timur. Hal ini disebabkan oleh posisi Kalimantan Barat yang memiliki nilai IPEI relatif lebih rendah dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, sehingga memerlukan perhatian analisis yang lebih mendalam untuk meningkatkan IPEI Provinsi Kalimantan Barat. Kedua, penelitian ini juga menghadapi keterbatasan ketersediaan dan keseragaman data pada tingkat kabupaten/kota di kedua provinsi selama periode pengamatan, sehingga ruang lingkup perbandingan empiris antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur masih terbatas.

### **5. Kesimpulan**

Pada Kalimantan Barat, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IPEI adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), akses listrik, dan akses internet. Temuan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi inklusif di Kalimantan Barat masih sangat bergantung pada pemenuhan prasyarat dasar berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan akses infrastruktur dasar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan nilai IPEI mendekati Kalimantan Timur, Kalimantan Barat perlu memperkuat fondasi pembangunan melalui perluasan akses listrik dan internet yang merata, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

Dalam jangka menengah dan panjang, perbaikan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia tersebut diharapkan mampu mendorong transformasi struktur ekonomi dan menciptakan pasar tenaga kerja yang lebih inklusif, sehingga variabel ketenagakerjaan seperti TPT berpotensi menjadi faktor yang lebih signifikan dalam meningkatkan IPEI di Kalimantan Barat.

Secara keseluruhan, perbedaan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap IPEI di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur menunjukkan bahwa strategi peningkatan pembangunan ekonomi inklusif perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tahap pembangunan masing-masing wilayah. Kalimantan Barat perlu memperkuat fondasi pembangunan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan infrastruktur dasar sebelum memasuki tahap penguatan pasar tenaga kerja seperti yang terjadi di Kalimantan Timur. Hal ini sejalan dengan RPJMD Kalimantan Barat 2025-2029 yang menargetkan program prioritas di bidang sumber daya manusia, ekonomi dan infrastruktur dasar, seperti bantuan pendidikan swasta, pengembangan lumbung pangan dan peningkatan infrastruktur dasar (jalan, air bersih, listrik, internet).

### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dan mendukung penulisan artikel ini.

### Referensi

- Adeleye, B. N., Arogundade, S., & Mduduzi, B. (2023). Empirical Analysis of Inclusive Growth, Information and Communication Technology Adoption, and Institutional Quality. *Economies*, 11. <https://doi.org/10.3390/economies11040124>
- Afdal, F. (2018). *Pengaruh Investasi Asing Langsung, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Bruto Pada 33 Provinsi di Seluruh Indonesia*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5360>
- Afriyana, L., Salmah, E., & Sriningsih, S. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 - 2021. *Elastisitas – Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v5i1.70>
- Anjani, I. R., & Prasetyo, P. E. (2024). Beta and Sigma Convergence Analysis of Inclusive Economic Growth on National and Regional Economic Growth in Indonesia. *Internasional Journal of Multidiciplinary: Applied Business and Education Research*, 5(5), 1858–1871. <https://doi.org/10.11594/ijmaber.05.05.29>
- Bappenas. (2019). *Public Hearing Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Sebagai Indikator Kualitas Pembangunan Nasional dan Daerah*. [https://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/kunci\\_penutup\\_-\\_bambang\\_ps\\_brodjonegoro.pdf](https://www.smeru.or.id/sites/default/files/events/kunci_penutup_-_bambang_ps_brodjonegoro.pdf)
- BPS. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. <https://www.bps.go.id>
- BPS. (2024). *Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. <https://lampung.bps.go.id/id/news/2024/05/07/326/pmdn-provinsi-lampung-tahun-2023-sebesar-7-625-809-juta-rupiah.html>
- BPS. (2024). Pengertian Tingkat Pengangguran Terbuka. In *Badan Pusat Statistik*. <https://www.bps.go.id/id>
- Fitrianasari, R. N. (2021). Analisis Dalam Globalisasi, Kebijakan Fiskal, dan Modal Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif: Studi Kasus Dengan Data

- Panel Pada 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. *Bestari Edisi 2*, 1(2), 29–38. <https://bestari.bpskaltim.com/index.php/bestari-bpskaltim/article/view/34>
- Gati, S. A., & Khoirunurrofik. (2023). The Effect of Telecommunication Infrastructure on Inclusive Economic Growth in Indonesia 2011–2021. *International Journal of Innovative Technologies in Social Science*, 2(38). [https://doi.org/10.31435/rsglobal\\_ijitss/30062023/8007](https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/30062023/8007)
- Handayani, W., & Karimi, K. (2024). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Indonesia Tahun 2015–2021. <https://ejournal.bunghatta.ac.id/index.php/JFEK/article/view/26221>
- Herdiyati, L., & Ismail, M. (2022). Government Spending and Investment for Inclusive Growth in Indonesia: A Panel Data Analysis. *Southeast Asian Journal of Economics*, 10(3), 27–73. <https://so05.tci-thaijo.org/index.php/saje/article/view/262485>
- Ianchovichina, E., & Lundstrom, S. (2009). *Inclusive Growth Analytics: Framework and Application* (Policy Research Working Paper, Issue March). <https://documents.worldbank.org>
- Ilyas, I., & Prasetya, F. (2023). Pengaruh Belanja Pemerintah dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4), 910–919. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.4.16>
- Jayanti, Tondi, L., & Dewangga, P. (2023). Pengaruh Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif pada Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019–2023. 10(1), 55–64. <https://jurnal-ekonomi.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/77>
- Kementrian ESDM. (2023). *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia*.
- Klasen, S. (2017). Measuring and monitoring inclusive growth in developing and advanced economies: multiple definitions, open questions and some constructive proposals. In C. Deeming & P. Smyth (Eds.), *Reframing Global Social Policy: Social Investment for Sustainable and Inclusive Growth* (p. 0). Policy Press. <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447332497.003.0006>
- Kristyanto, V. S., & Kaluge, D. (2018). Peningkatan Inklusivitas Ekonomi Melalui Pembiayaan Investasi Modal Manusia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(2), 170. <https://doi.org/10.24843/jekt.2018.v11.i02.p04>
- Maknun, L. L. I. (2024). Pengaruh Rata Lama Sekolah, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Persentase Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 08(02), 199–209. <https://doi.org/10.22219/jie.v8i02.32862>
- Marina, I., & Satrianto, A. (2023). Analysis of Government Expenditure Response, Foreign Direct Investment, Human Development Index, and Inclusive Economic Growth in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 21(01), 85–97. <https://doi.org/10.22219/jep.v21i01.25932>
- Nchake, M. A., & Shuaibu, M. (2022). Investment in ICT infrastructure and inclusive growth in Africa. *Scientific African*, 17. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2022.e01293>
- Nurlina, Safuridar, & Maulana, Z. (2021). *Analysis of Inclusive Economic Development*

- Index and Poverty in Aceh Province , Indonesia*. 179(Piceeba 2020), 131–140. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210616.020>
- Oktavia, A. N. (2024). Analisis Determinan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmu Ekonomi ( JIE )*, 08(02), 152–163. <https://doi.org/10.22219/jie.v8i02.31780>
- Opoku, E. E. O., Acheampong, A. O., & Salim, R. (2025). Does energy access matter for achieving inclusive growth? Insight from a global perspective. *Applied Economics*, 00(00), 1–18. <https://doi.org/10.1080/00036846.2025.2503490>
- Oyinlola, M. A., Adedeji, A. A., & Onitekun, O. (2021). Human capital , innovation , and inclusive growth in sub-Saharan African Region. *Economic Analysis and Policy*, 72, 609–625. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2021.10.003>
- Pratiwi, I. A. M. (2024). Inclusive Transformation : Analysis of the Role of Electricity and ICT in Promoting Equitable Economic Development in Indonesia. In *Proceedings of the 8th International Conference on Accounting, Management, and Economics (ICAME 2023)* (Issue Icame 2023, pp. 175–187). Atlantis Press International BV. <https://doi.org/10.2991/978-94-6463-400-6>
- Prawesti, R. P. (2023). Analisis Investasi dan Peran Teknologi Informasi Terhadap Pembangunan Ekonomi Inklusif di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(03), 381–392. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i03.27666>
- Rafindadi, A. A., Aliyu, I. B., & Usman, O. (2022). Revisiting the electricity consumption - led growth hypothesis : is the rule defied in France ? *Journal of Economic Structures*, 11(27). <https://doi.org/10.1186/s40008-022-00290-8>
- Raheem, I. D., Isah, K. O., & Adedeji, A. A. (2018). Inclusive growth , human capital development and natural resource rent in SSA. *Economic Change and Restructuring*, 51(1), 29–48. <https://doi.org/10.1007/s10644-016-9193-y>
- Rahmawati, F., Purwanti, S. D., & Ramadhani, N. (2021). The Effect of Trade Openness and Investment Realization on Inclusive Economic Growth in Cities and Districts of East Java in 2015-2019. *Nusantara Science and Technology Proceedings, 2021*, 246–255. <https://doi.org/10.11594/nstp.2021.1030>
- Romer, P. M. (1986). Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*, 94(5), 1002–1037. <https://doi.org/10.1086/261420>
- Romer, P. M. (1989). *Endogenous Technological Change* (3210; NBER Working Paper Series, Issue 3210).
- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5 (Part 2)), S71–S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Sambodo, M. T., Negara, S. D., & helmy Fuady, A. (2016). *Akses Listrik dan Kesejahteraan Masyarakat*. LIPI Press. <https://doi.org/10.14203/press.90>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* (13th ed.). Pearson. <https://books.google.co.id/books?id=VU0WYQEACAAJ>
- UNDP. (2024). *Human Develoment Report 2023/2024 Technical Notes*. <https://hdr.undp.org>
- UNDP. (2024). *Human Development Report 2023/2024: Breaking the Gridlock – Reimagining Cooperation in a Polarized World*. <https://hdr.undp.org>

- Xu, H., Ahmad, M., Luqman, A., Uddin, I., & Aljuaid, M. (2024). The linkages between energy efficiency , renewable electricity , human capital and inclusive growth : The role of technological development. *Energy Strategy Reviews*, 53(November 2023), 101414. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2024.101414>
- Zhulaikah, S. (2024). Socio-Economic Influence on Inclusive Economic Development in Eastern Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 08(04), 352–363. <https://doi.org/10.22219/jie.v8i04.32847>